

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH, PAJAK  
DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN DANA  
PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PADA  
PEMERINTAH KABUPATEN DI PROVINSI JAWA TENGAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh :

**FIFTI NURNIYATI**

**NIM : 4317068**

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN 2022**

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH, PAJAK  
DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN DANA  
PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PADA  
PEMERINTAH KABUPATEN DI PROVINSI JAWA TENGAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh :

**FIFTI NURNIYATI**

**NIM : 4317068**

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN 2022**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fifti Nurniyati  
NIM : 4317068  
Judul Skripsi : PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH, PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN DI PROVINSI JAWA TENGAH

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 28 Desember 2021  
Yang Menyatakan,



**FIFTI NURNIYATI**  
**NIM. 4317068**

## NOTA PEMBIMBING

**Alvita Tyas Dwi A, M.Si., Ak**

Jl. Seroja 2 No. 43 Graha Tirto Asri, Tirto, Pekalongan, Jawa Tengah

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Fifti Nurniyati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c.q Ketua Jurusan Akuntansi Syariah

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : **Fifti Nurniyati**

NIM : **4317068**

Judul Skripsi : **Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten DI Provinsi Jawa Tengah**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Pekalongan, 20 Desember 2021

Pembimbing,



**Alvita Tyas Dwi A, M.Si., Ak**

NIP. 19840612 201903 2 011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Pahlawan No. 52 Rowolaku, Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **Fifti Nurniyati**  
NIM : **4317068**  
Judul Skripsi : **Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah**

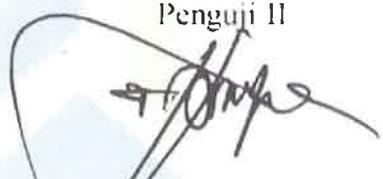
Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 dan dinyatakan **LULUS** dan diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun).

Dosen Penguji,

Penguji I

  
**H. Ahmad Rosyid, S.E, M.Si**  
NIP.197903312006041033

Penguji II

  
**Wahid Wachyu Adi W, M.Si**  
NIP.198410312019081001

Pekalongan, 23 Februari 2022

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



  
**Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.**  
NIP. 197502201999032001

## ABSTRAK

### **FIFTI NURNIYATI. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah.**

Belanja modal memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya untuk menyediakan pelayanan publik. Sebagai upaya untuk menghindari pemborosan anggaran pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran belanja untuk menambah asset daerah dan untuk perbaikan sarana dan prasarana guna memberikan pelayanan publik yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kinerja keuangan daerah, pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan terhadap belanja modal.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kausalitas dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik dokumentasi. Populasi dari penelitian ini yaitu Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 29 Kabupaten. Sempel dalam penelitian yaitu Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2019. Metode pengolahan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan program SPSS 22.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan dimana dalam penelitian ini menggunakan indikator rasio efisiensi berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan secara parsial variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal. Secara simultan variabel kinerja keuangan daerah, pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal.

Kata kunci : Kinerja Keuangan Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal.

## **ABSTRACT**

### **FIFTI NURNIYATI. The Influence Of Regional Financial Performance, Regional Taxes, Regional Levies And Balancing Funds On Capital Expenditures In District Governments In The Province Of Central Java.**

Capital expenditure has a very important role in efforts to provide public services. In an effort to avoid wasting the budget, local governments can use the budget to increase regional assets and to improve facilities and infrastructure to provide adequate public services. This study aims to determine the effect of regional financial performance, regional taxes, regional levies, and balancing funds on capital expenditures.

This research is included in the type of causality research using a quantitative approach. The data collection method used in this research is documentation technique. The population of this study is the Regency Government in Central Java Province, totaling 29 regencies. The sample in the research is the Report on the Realization of Regional Government Budgets and Expenditures in the Central Java Province in 2018-2019. The data processing method used in this study uses the SPSS 22 program.

The results of this study indicate that financial performance which in this study uses the efficiency ratio indicator has a positive effect on capital expenditure. Meanwhile, partially the local taxes, regional levies, and balancing funds have no positive effect on capital expenditures. Simultaneously, regional financial performance variables, regional taxes, regional levies, and balancing funds have an effect on capital expenditures.

**Keywords:** Regional Financial Performance, Regional Taxes, Regional Levies, Balancing Funds, and Capital Expenditures.

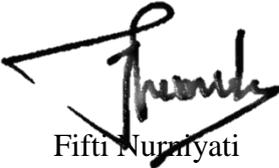
## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi Jurusan Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati selaku Dekan FEBI IAIN Pekalongan
2. Dr. H. Tamamudin selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI IAIN Pekalongan
3. Bapak Ade Gunawan, M.M selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah FEBI IAIN Pekalongan
4. Ibu Ria Anisatus Sholihah, M.S.A., C.A selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah FEBI IAIN Pekalongan
5. Ibu Alvita Tyas Dwi A, M.Si., Ak selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Agus Arwani, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA)
7. Bapak H. Ahmad Rosyid, S.E, M.Si selaku penguji I
8. Bapak Wahid Wachyu Adi W, M.Si selaku penguji II
9. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
10. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Akuntansi Syariah angkatan 2017

Akhir kata,saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 25 Desember 2021



Fifti Nurliyati

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat.....	10
D. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>14</b>
A. Landasan Teori .....	14
B. Telaah Pustaka.....	33
C. Kerangka Berfikir .....	41
D. Hipotesis .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Jenis Penelitian .....	45
B. Pendekatan Penelitian.....	45
C. <i>Setting</i> Penelitian .....	45
D. Populasi dan Sempel Penelitian.....	46
E. Variabel Penelitian .....	47
F. Sumber Data .....	50
G. Teknik Pengumpulan Data .....	51
H. Metode Analisis Data .....	51
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	56
B. Obyek Penelitian .....	57
C. Analisis Hasil Penelitian .....	57
D. Pembahasan.....	71
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
A. Simpulan.....	82
B. Keterbatasan Penelitian .....	83
C. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Š	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	esdan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (denga ntitik dibawah)
ع	'ain	‘	komater balik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha
ء	Hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بهنّ = *bihinna*

## III. Vokal Pendek

*Fathah* (o`\_) ditulis a, *kasrah* (o\_) ditulis I, dan *dammah* (o \_) ditulis u.

## IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti تفصيل: ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول, ditulis *usul*.

## V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*

2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

## VI. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية  
ditulis *bidayah al-hidayah*.

## VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,(, ) seperti شئى ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربائب ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (, ) seperti تاخذون ditulis *ta'khuzuna*.

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti denganhuruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

## **IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat**

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : ذوي الفرود ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*.

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Jenis Pajak Provinsi & Pajak Daerah, 28
Tabel 2. 2	Jenis-Jenis Retribusi Daerah, 30
Tabel 2. 3	Telaah Pustaka, 34
Tabel 3. 1	Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, 46
Tabel 3. 2	Prosentase Kinerja Keuangan Daerah, 48
Tabel 3. 3	Kriteria Penilaian Autokolerasi, 53
Tabel 4. 1	Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, 57
Tabel 4. 2	Analisis Deskripti, 58
Tabel 4. 3	Uji Normalitas Data, 61
Tabel 4. 4	Uji Multikolinearitas, 62
Tabel 4. 5	Uji Heteroskedastisitas dengan Rank Spearman, 63
Tabel 4. 6	Kriteria Penilaian Uji Durbin Watson, 64
Tabel 4. 7	Uji Autokorelasi Dengan Durbin Watson, 64
Tabel 4. 8	Uji Autokorelasi Dengan Metode Cochran Orcutt, 65
Tabel 4. 9	Analisis Regresi Linier Berganda, 66
Tabel 4.10	Uji Parsial (Uji t), 68
Tabel 4. 11	Uji Simultan (Uji F), 70
Tabel 4. 12	Koefisien Determinasi, 70

## **DAFTAR GRAFIK**

- Grafik 1. 1 Belanja Modal, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018, 3
- Grafik 1. 2 Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Belanja Modal, Defisit/Surplus Anggaran Tahun 2019, 4
- Grafik 1. 3 PAD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Modal Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah , 6
- Grafik 1. 4 Dana Perimbangan dan Pendapatan Daerah, 8

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2019, I
- Lampiran 2 Realisasi Belanja Modal, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2019, III
- Lampiran 3 Realisasi Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2019, V
- Lampiran 4 Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2019, VII
- Lampiran 5 Rasio Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2019, IX
- Lampiran 6 Rasio Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2019, XI
- Lampiran 7 Rasio Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2019, XIII
- Lampiran 8 Rasio Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2019, XV
- Lampiran 9 Hasil Analisis Deskriptif, XVII
- Lampiran 10 Uji Asumsi Klasik, XVIII
- Lampiran 11 Regresi Linear Berganda, XX
- Lampiran 12 Uji Hipotesis, XXI
- Lampiran 13 Hasil Olah Data Setelah Menggunakan Metode Cochrane Orcutt, XXII
- Lampiran 14. Daftar Riwayat Hidup, XXVII

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan suatu negara yang menerapkan kebijakan otonomi daerah, dimana pemerintah daerah diberi hak untuk mengelola urusan pemerintahan dan keperluan atau kepentingan rakyatnya di lingkungan daerah. Otonomi daerah disini terlihat dalam proses mengelola keuangan daerah yang biasa disebut dengan desentralisasi fiskal atau otonomi fiskal. Dalam melaksanakan otonomi daerah tidak dapat terpisah dari penyusunan anggaran keuangan bagi daerah. Anggaran yang diterima oleh daerah dapat digunakan sebagai acuan pemerintah daerah dalam menjalankan segala aktivitas pemerintahan. Dalam tingkat daerah anggaran keuangan dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Organisasi sektor publik seringkali menghadapi permasalahan terutama dalam pengalokasian anggaran (H. Gerungan dkk., 2017). Pemerintah daerah seharusnya menggunakan penerimaan yang diperoleh untuk pengeluaran yang produktif meskipun sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh penerimaan tersebut begitu terbatas (Mamonto dkk., 2015).

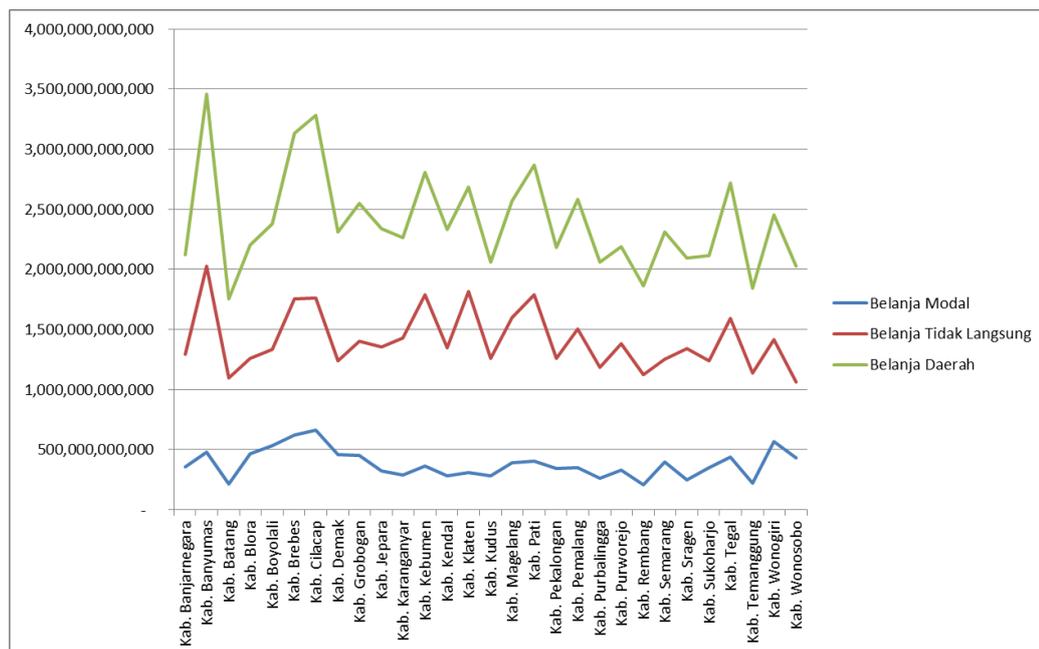
Belanja modal adalah pengeluaran guna memperoleh aktiva tetap dan aktiva lainnya, dimana memiliki kegunaan melebihi satu tahun selama satu periode akuntansi yang terdiri atas belanja modal untuk memperoleh tanah, gedung & bangunan, peralatan, aktiva tidak berwujud. Ulum (2008)

menyatakan bahwa, kelancaran tugas pemerintah daerah dan peningkatan fasilitas publik tergantung pada bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan dana yang dimiliki dalam bentuk pengeluaran modal (Intani, 2018). Belanja modal memiliki efek jangka panjang terhadap investasi yang nantinya masuk ke daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sumber-sumber penerimaan daerah. Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dimana pemerintah daerah diharuskan mengalokasikan anggaran sebesar 26% - 30% untuk belanja modal dari total pengeluaran daerah yang nantinya dapat meningkatkan dan memperbaiki pembangunan daerah (Sukmaji & Rohman, 2019).

Menurut data Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) bahwa belanja modal di Provinsi Jawa Tengah 2018 tergolong paling rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya. Jika dibandingkan dengan belanja daerah, alokasi belanja modal Provinsi Jawa Tengah di tahun 2018 sebanyak 7,5% dibawah nilai rata-rata belanja modal seluruh provinsi. Sedangkan untuk persentase belanja pegawai maupun belanja barang & jasa terhadap total belanja daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 mencapai 27,2% dan 16,4%. Pada tahun 2019, distribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Tengah terjadi perubahan yaitu pagu belanja pegawai, belanja barang dan bansos meningkat, namun pagu belanja modal mengalami penurunan. Dibandingkan dengan jenis belanja yang lain, belanja barang dan belanja pegawai tetap memiliki distribusi yang besar. Kecilnya porsi belanja modal, mengakibatkan dana tersebut didistribusikan untuk belanja infrastruktur,

irigasi, jaringan, belanja usaha dan untuk mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

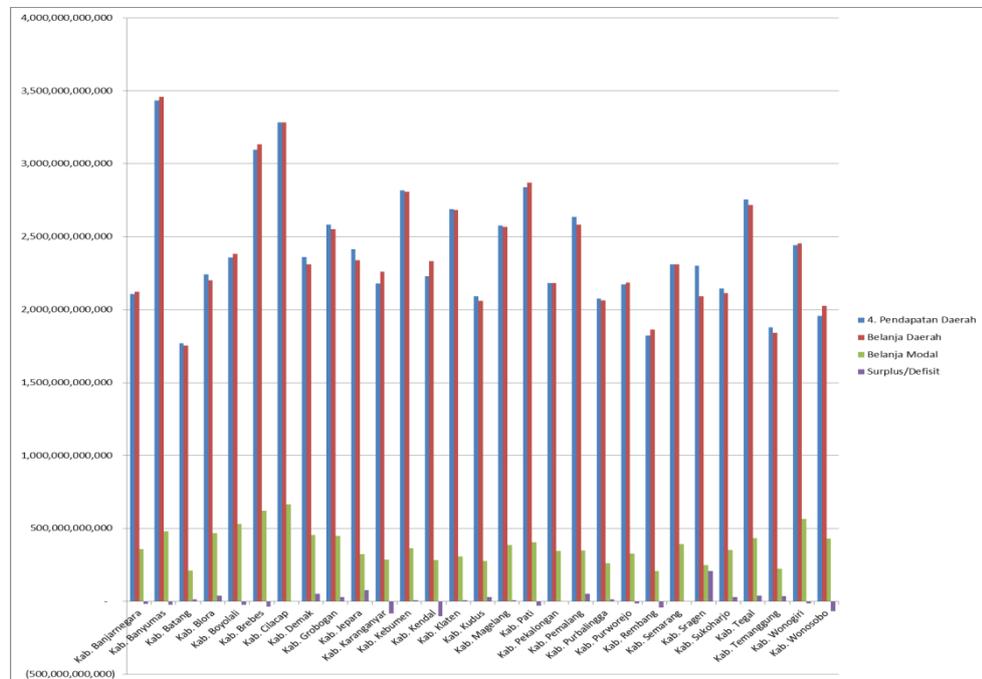
**Grafik 1. 1**  
**Belanja Modal, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019**



Sumber : [www.djpk.go.id](http://www.djpk.go.id) (Data Diolah)

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui jika persentase belanja modal Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah cenderung lebih rendah dari pada persentase belanja tidak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalokasin anggaran belanjanya untuk belanja tidak langsung dari pada belanja modal. Porsi belanja modal dalam total belanja daerah yang kecil, menunjukkan kualitas pengeluaran daerah terutama dalam sisi belanja perlu ditingkatkan.

**Grafik 1.2**  
**Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Belanja Modal, dan Defisit Anggaran**



Sumber : [www.djpk.go.id](http://www.djpk.go.id) (Data Diolah)

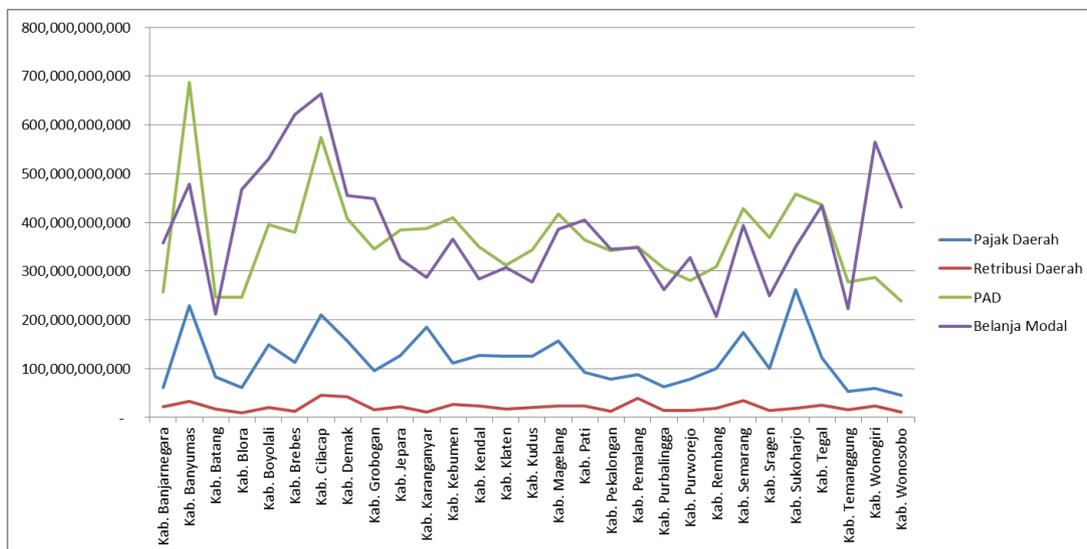
Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa peningkatan belanja modal suatu daerah dibarengi dengan meningkatnya defisit anggaran. Kondisi inti terjadi karena adanya peningkatan kebutuhan fasilitas yang harus terpenuhi. Defisit anggaran terjadi karena besarnya biaya yang dikeluarkan untuk belanja namun jumlah pendapatan yang diterima lebih kecil. Apabila suatu daerah mengalami kondisi deficit anggaran maka pemerintah daerah dapat menggunakan penerimaan dari pembiayaan untuk menutup anggaran dan sisa lebih dari pembiayaan tersebut nantinya dapat digunakan untuk menunjang program-program pembangunan daerah.

Menurut Arsa & Setiawina (2015), kinerja keuangan daerah dapat digunakan sebagai salah satu cerminan meningkatkan dan melihat kesanggupan

maupun kemampuan keuangan daerah. Riswan & Affandi (2014) berpendapat bahwa, jika kinerja keuangan berjalan baik maka akan berdampak positif terhadap pengeluaran investasi untuk pelayanan publik. Distribusi belanja modal dapat dipengaruhi oleh perubahan kinerja keuangan daerah (Prihastuti dkk., 2015). Penelitian yang dilaksanakan oleh Arif & Arza (2018) menyatakan, dimana kinerja keuangan yang terdiri atas efektifitas, efisiensi keuangan daerah, dan keserasian belanja daerah mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap alokasi belanja modal, namun untuk kemandirian keuangan daerah tidak ada pengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal pada Pemda Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2013-2017. Berbeda dengan penelitian Indiyanti & Rahyuda (2018) menyatakan bahwa, indikator kinerja keuangan yaitu rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Bali.

Salah satu kontribusi masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah yaitu dengan memberikan pajak daerah dan retribusi daerah, dari dana tersebut dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan iuran yang ditarik oleh pemerintah daerah dan para wajib pajak tidak mendapat imbalan langsung dari pemerintah daerah (Anggoro, 2017). Sedangkan retribusi daerah merupakan pembayaran atas jasa atau ijin yang diberikan oleh pemerintah pada individu atau badan.

**Grafik 1.3**  
**PAD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Modal Kabupaten di**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019**



Sumber : [www.djpk.go.id](http://www.djpk.go.id) (Data Diolah)

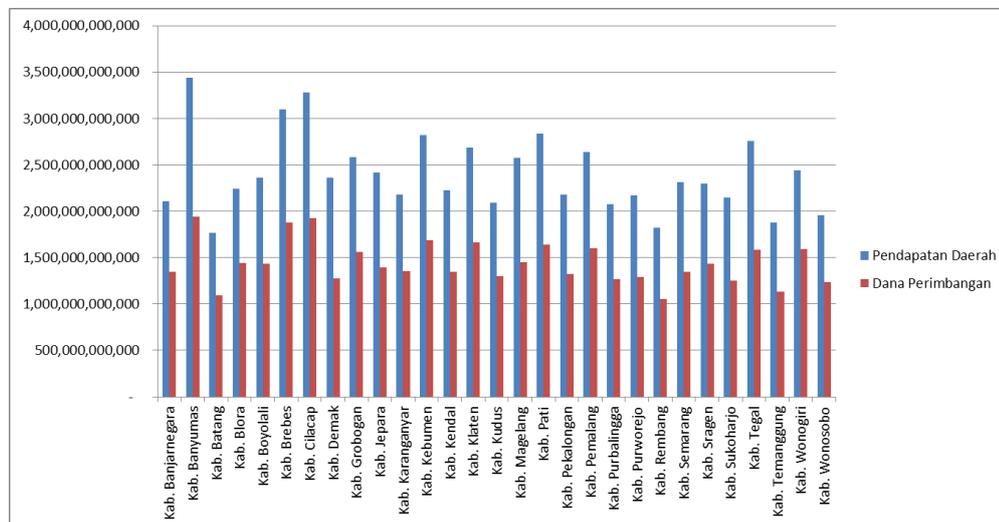
Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa PAD terbesar diterima oleh Kabupaten Banyumas sebesar Rp 648.326.914.035 dengan kontribusi pajak daerah sebesar 32,63% dan retribusi daerah sebesar 5% dibandingkan dengan kabupaten lain. Akan tetapi Tingginya PAD daerah yang diterima oleh Kabupaten Banyumas tidak diikuti dengan tingginya belanja modal. Belanja modal tertinggi dikeluarkan oleh Kabupaten Cilacap sebesar Rp 550.840.750.506 yang jumlah PAD nya lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Banyumas.

Sebagai sumber pendapatan bagi daerah, pajak daerah memiliki peran besar bagi pembangunan daerah. Apabila jumlah pajak daerah yang diterima mengalami kenaikan, maka pendapatan daerah juga akan naik, yang nantinya dapat menambah belanja modal. Dalam rangka meningkatkan pajak daerah,

pemerintah daerah perlu memanfaatkan potensi kekayaan maupun sumber daya yang dimiliki. Selain pajak daerah, besar kecilnya retribusi daerah yang diterima oleh pemerintah juga akan mempengaruhi alokasi pendapatan untuk belanja modal. Penelitian Mamonto dkk., (2015) menyatakan, pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dan tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel retribusi daerah terhadap belanja modal di Kota Jambi. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian Hasnur (2016), jika retribusi daerah dan pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan pada belanja modal.

Setiap daerah memiliki kemampuan yang berbeda dalam mendanai berbagai kegiatan, kondisi seperti inilah yang menyebabkan terjadinya kesenjangan fiskal antar daerah dengan daerah lainnya yang mendorong pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana transfer yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal (P. R. Aryani & Hari, 2019). Dana perimbangan yaitu dana yang ditransfer pemerintah pusat dari APBN dan didistribusikan ke daerah sebagai upaya mendanai keperluan daerah dan membentuk perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah demi terlaksananya desentralisasi fiskal (Ferdiansyah dkk., 2018). Melalui transfer dana ini, harapannya pemerintah daerah dapat menggunakan PAD yang diterimanya untuk mendanai belanja modal daerah (Nurdiwaty dkk., 2017).

**Grafik 1.4**  
**Dana Perimbangan dan Pendapatan Daerah**



Sumber : [www.djpk.go.id](http://www.djpk.go.id) (Data Diolah)

Berdasarkan grafik diatas hampir seluruh pendapatan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah bersumber dari dana transfer atau dana perimbangan. Tingginya dana perimbangan yang diterima setiap tahun yaitu masih diatas angka 50% memperlihatkan jika pemerintah daerah masih ketergantungan pada pembayaran transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat masih sangat tinggi, namun jumlah PAD yang diterima masih sangat rendah. Dengan kondisi seperti ini, pemerintah daerah wajib mengoptimalkan PAD yang berasal dari pajak dan retribusi daerah untuk memperkecil tingkat ketergantungan pada transfer dari pusat.

Tingginya dana perimbangan yang diterima namun tidak dibarengi dengan tingginya belanja modal menunjukkan jika Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengan belum mampu mengoptimalkan dana transfer yang diterima untuk meningkatkan pelayanan publik. Penelitian (Intani, 2018)

menyatakan, dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Pemerintah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dkk (2017), penelitiannya menghasilkan sebuah kesimpulan dimana dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di wilayah bodetabek periode 2006-2015.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian terkait pengaruh indikator kinerja keuangan daerah dengan menggunakan indikator rasio efisiensi dan pengaruh sumber-sumber penerimaan daerah terhadap belanja modal dengan judul penelitian **PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH, PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN DI PROVINSI JAWA TENGAH.**

## **B. Rumusan Masalah**

Adanya perubahan pola belanja khususnya pada belanja modal menimbulkan pertanyaan tentang seberapa besar pengaruh efisiensi daerah dalam mengalokasikan anggarannya untuk belanja modal dan besarnya pendapatan daerah terhadap pola belanja pemerintah daerah. Peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah belum dimaksimalkan untuk membiayai belanja modal. Besarnya dana perimbangan yang diterima oleh setiap pemerintah daerah dimana persentasenya mencapai 50% menandakan bahwa pemerintah daerah masih

tergantung pada besarnya transfer dari pemerintah pusat namun tidak dimaksimalkan untuk belanja modal. Selain itu, distribusi belanja modal setiap Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah belum sesuai apa yang diharapkan pemerintah pusat, dimana pemerintah daerah diberi target besarnya distribusi belanja modal 26%-30%. Obyek pada penelitian ini yaitu Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan alasan pemerintah kabupaten sebagai salah satu elemen pemerintahan yang menjalankan dan mampu mengaplikasikan kebijakan anggaran untuk keperluan masyarakat di setiap wilayah. Berdasarkan indentifikasi masalah diatas adapun pertanyaan dari rumusan masalah diatas adalah :

1. Apakah kinerja keuangan daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah?
3. Apakah retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah?
4. Apakah dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah?

### **C. Tujuan dan Manfaat**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dilaksanakan penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui apakah kinerja keuangan daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah.
- b. Untuk mengetahui apakah pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal pada pada Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah.
- c. Untuk mengetahui apakah retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah.
- d. Untuk mengetahui apakah dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini antara lain, sebagai berikut :

### a. Manfaat Teoritis

penelitian ini dapat digunakan menjadi referensi untuk mempelajari lebih lanjut tentang sumber penerimaan daerah yang alokasi belanja modal. Selain itu juga dapat menambah Ilmu pengetahuan mengenai organisasi sektor publik.

### b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini antara lain, yaitu :

- 1) Bagi Peneliti, penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya wawasan yang berkaitan dengan sumber penerimaan suatu daerah

yang dipergunakan untuk mendanai kebutuhan pemerintah daerah khususnya belanja modal.

- 2) Bagi Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah, harapannya penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur bagi Pemerintah Kabupaten saat mendistribusikan sumber penerimaan dengan efisien dan efektif. Khususnya untuk menaikkan persentase belanja modal untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur demi terciptanya pelayanan publik yang memadai.
- 3) Bagi Masyarakat, dapat mempermudah masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah khususnya pada tingkat Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah khususnya ketika pengalokasian dan penggunaan APBD untuk Belanja Modal.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini peneliti menjelaskan terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian

##### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi uraian kepustakaan yang digunakan dan mendukung permasalahan yang diteliti, yaitu memberikan penjelasan dari berbagai sumber pustaka yang menjadi acuan permasalahan yang akan dibahas.

##### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini peneliti menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, tempat penelitian, populasi dan sampel

penelitian, variabel penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan secara keseluruhan hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran untuk penelitian berikutnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat diambil sebuah kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja keuangan daerah (X1) dengan menggunakan indikator rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal (Y). Hal ini dilihat dari nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $3.411 > 1.67203$ ) dan nilai signifikan lebih kecil dari 0.05 ( $0.001 < 0.05$ ). Maka hipotesis dalam penelitian ini diterima ( $H_1$  diterima).
2. Pajak daerah (X2) tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal (Y). Hal ini dilihat dari nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$  ( $0.246 < 1.67203$ ) dan nilai signifikan lebih besar dari 0.05 ( $0.807 > 0.05$ ). Maka hipotesis dalam penelitian ini ditolak ( $H_2$  ditolak).
3. Retribusi daerah (X3) tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal (Y). Hal ini dilihat dari nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$  ( $0.092 < 1.67203$ ) dan nilai signifikan lebih besar dari 0.05 ( $0.927 > 0.05$ ). Maka hipotesis dalam penelitian ini ditolak ( $H_3$  ditolak).
4. Dana perimbangan (X4) tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal (Y). Hal ini dilihat dari nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$  ( $1.203 < 1.67203$ ) dan nilai signifikan lebih besar dari 0.05 ( $0.234 > 0.05$ ). Maka hipotesis dalam penelitian ini di tolak ( $H_4$  ditolak)

5. Secara bersama-sama atau simultan bahwa variabel kinerja keuangan daerah (X1), pajak daerah (X2), retribusi daerah (X3), dan dana perimbangan (X4) berpengaruh terhadap belanja modal (Y). Hal ini dilihat dari nilai  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$  ( $3.360 > 2.55$ ) dan nilai signifikan lebih kecil dari 0.05 ( $0.016 < 0.05$ ), maka hipotesis dalam penelitian ini diterima ( $H_5$  diterima).
6. Nilai koefisien determinasi yang dilihat dari nilai *Adjust R Square* sebesar 0.144 atau 14.4% artinya memiliki korelasi yang lemah dalam menjelaskan variabel kinerja keuangan daerah, pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal, sedangkan untuk sisanya 95.6% ( $100\% - 14.4\% = 95.6\%$ ) dijelaskan oleh variabel lain.

## **B. Keterbatasan Penelitian**

Berdasarkan hasil olah data dan penelitian adapun keterbatasan dalam penelitian ini antara lain :

1. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari *website* DJPK RI ([www.djpk.go.id](http://www.djpk.go.id)) berupa Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
2. Periode relatif penelitian relatif singkat yaitu periode 2018 sampai 2019. Sehingga diperoleh jumlah sampel yang sangat terbatas.
3. Populasi penelitian hanya difokuskan pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
4. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada kinerja keuangan daerah dengan menggunakan rasio efisiensi dan sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan dana

perimbangan sehingga perlu adanya penambahan variabel terikat yang lainnya.

### **C. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terkait dengan hasil penelitian ini untuk memperbaiki penelitian berikutnya, antara lain :

1. Melihat tingginya pengeluaran pemerintah daerah terhadap total pendapatan daerah menandakan bahwa pemerintah daerah kurang efisien dalam menggunakan anggaran sehingga menyebabkan pengalokasian anggaran untuk belanja modal menjadi rendah, sebaiknya pemerintah memperbaiki lagi dalam proses penyaluran anggaran untuk belanja seperti halnya untuk belanja modal guna meningkatkan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Melihat jika pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. sebaiknya pemerintah daerah lebih optimal lagi dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang nantinya dapat digunakan untuk membiayai kepentingan daerah dan dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah.
3. Tingginya dana perimbangan yang diterima setiap daerah namun tidak berdampak pada peningkatan belanja modal, sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan proporsi dana perimbangan yang dialokasikan untuk belanja modal dibandingkan untuk belanja operasional lainnya.

4. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel lain yang lebih bervariasi sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih kompleks sesuai dengan teori yang mendukung seperti halnya penerimaan APBD atas pembiayaan atas SiLPA, pertumbuhan ekonomi maupun luas wilayah.
5. Bagi penelitian selanjutnya juga dapat memisahkan atau membagi kembali dari variabel dana perimbangan menjadi beberapa bagian yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil.
6. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas populasi atau sampel penelitian seperti halnya seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah atau seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Ardhani, P., & Ardiyanto, M. D. (2011). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah)* [PhD Thesis]. Universitas Diponegoro.
- Arif, M., & Arza, F. I. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013–2017. *Riset Manajemen dan Akuntansi*, 9(2).
- Arifah, N. A., & Haryanto, H. (2019). Analisis Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2).
- Arsa, I. K., & Setiawina, N. D. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan pada Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2006 sd 2013. *Buletin Studi Ekonomi*.
- Arwaty, D., & Hadiati, N. (2013). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Daerahkabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Barat*.
- Aryani, A. (2021). *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik (Studi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur)* [PhD Thesis]. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Aryani, P. R., & Hari, K. K. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Sumatera Selatan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 24(2), 84–97
- Asih, S. (2018). Pengaruh kontribusi pajak daerah, pendapatan asli daerah, retribusi daerah dan bagi hasil pajak terhadap belanja daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderating pemerintah kabupaten dan kota. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(1), 177–191.
- Asmara, J. A. (2017). *Pengaruh Pendapatan Sendiri Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dengan Dana Otonomi Khusus Sebagai*

*Pemoderasi Pada Kab/Kota Di Provinsi Aceh* [PhD Thesis]. Syiah Kuala University.

- Badjra, I. B., Mustanda, I. K., & Abudanti, N. (2017). Kontribusi pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal dan kinerja keuangan daerah Provinsi Bali. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6(1), 29–40.
- Basuki, A. T. (2014). *Uji Autokorelasi dan Perbaikan Autokorelasi*.
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Ebbank*, 8(1), 33–48.
- Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. *INOVASI*, 14(1), 44–52.
- Fitri, V. K., Rasuli, M., & Silfi, A. (2013). Pengaruh rasio keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di provinsi riau Tahun 2009-2012. *Universitas Riau. Riau*.
- Gerungan, H., Saerang, D. P., & Ilat, V. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Uumu, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara). *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 8(1).
- Gerungan, S. F., Saerang, D. P. E., & Pontoh, W. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Sulawesi Utara. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 6(1).
- Halim, A. (2001). *Akuntansi Sektor Publik—Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2010). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1), 53–64.
- Handayani, S. P., Abdullah, S., & Fahlevi, H. (2015). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 4(2).
- Haqiqi, F. (2020). Analisis Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Periode 2016-2018. *Jurnal Cafeteria*, 1(1), 13–21.

- HASBULLAH, R. N. (t.t.). *PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL*.
- Hasnur, A. F. (2016). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Dengan Luas Wilayah Sebagai Variabel Moderating pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan* [PhD Thesis]. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Heryanti, C. D., Wahidahwati, W., & Suryono, B. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(8).
- Indiyanti, N. M. D., & Rahyuda, H. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen*, 7(9), 4713–4746.
- Intani, R. (2018). *PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012-2016*.
- Koton, Y. P. (2019). *Restrukturisasi Organisasi: Teori dan Aplikasi Dalam Mengefektifkan Pengelolaan Keuangan Daerah*. Deepublish.
- Machmud, M. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. *Jurnal berkala ilmiah efisiensi*, 14(2).
- Mamonto, S., Kalangi, J., & Tolosang, K. (2015). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2004-2013). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(01).
- Manopo, N., Rotinsulu, D. C., & Murni, S. (2019). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 17(2).
- Maulida, A., Supriadi, O., & Yusuf, M. (2012). *Efektivitas Pengelolaan Pajak Restoran di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang* [PhD Thesis]. FISIP Untirta.
- Mikha, D. (2010). Analisis kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten sleman. *Kajian Akuntansi*, 5(1), 66–79.
- Natoen, A., Ardiani, S., Nouvanti, F., Prasetyo, G., & Safitri, M. D. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Perimbangan

Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Selatan. *JURNAL RISET TERAPAN AKUNTANSI*, 4(2), 158–168.

- Nurdiwaty, D., Zaman, B., & Kristinawati, E. (2017). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja modal di kabupaten/kota Jawa Timur. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 17(1), 43–59.
- Pancawardani, N. L. (2010). ADAKAH PERILAKU OPORTUNISTIK DALAM APLIKASI AGENCY THEORY DI SEKTOR PUBLIK? *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 5(2).
- Pilat, J. J., & Morasa, J. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015. *ACCOUNTABILITY*, 6(1), 45–56.
- Prihastuti, A. H., Taufik, T., & Agusti, R. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Riau. *Sorot*, 10(2), 143–154.
- Purnomo, R. A. (2017). *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS*. CV. WADE GROUP bekerjasama dengan UNMUH Ponorogo Press.
- Putri, R. S., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 3(2), 256–268.
- Rahmawati, M., & Fajar, C. M. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1).
- Ramadhani, Y. (2019). Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng. *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi dan Teknik Informatika "JISTI"*, 2(2), 42–51.
- Ramlan, D., & Abdullah, S. (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh). *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 5(2).
- Riswan, R., & Affandi, A. (2014). Pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan publik dalam perspektif teori keagenan. *Jurnal Akuntansi dan keuangan*, 5(2).

- Rizal, Y. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(1), 74–83.
- Rudy, R. P. H. (2021). PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN. *Jurnal GeoEkonomi*, 12(2), 244–259.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kuantitatif: Quantitative research approach*. Deepublish.
- Santy, D., Amir, A., & Wahyudi, I. (2020). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2013-2017. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 5(3), 203–212.
- Sanusi, A. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat.
- Sari, N., Djuanda, G., & Sarwani, S. (2017). PENGARUH DANA PERIMBANGAN, DANA SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA MODAL DAN DAMPAKNYA PADA PERTUMBUHAN EKONOMI DI WILAYAH BODETABEK PERIODE 2006 s/d 2015. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 2(1).
- Sasana, H. (2011). Analisis determinan belanja daerah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat dalam era otonomi dan desentralisasi fiskal. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 18(1), 24285.
- Sijabat, M. Y. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012). *Jurnal administrasi publik*, 2(2), 236–242.
- Sino, S., Ruliana, T., Sino, I. N. S., Ruliana, T., Sino, I. N. S., Ruliana, T., & Latif, I. N. (2016). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kantor Sekretariat Kabupaten Kutai Barat. *Ekonomia*, 5(1), 432–438.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Sudika, I. K., & Budiarta, I. K. (2017). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi*, 21(2), 1689–1718.

- Sugiardi, N. P. D. E. R., & Supadmi, N. L. (2014). Pengaruh PAD, DAU, dan SILPA pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 7(2).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. CV.
- Sukmaji, D. D., & Rohman, A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Kinerja Keuangan Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 8(4).
- Sularso, H., & Restianto, Y. E. (2012). Pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi*, 1(2).
- Susanto, H. (2014). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 10(1), 15–26.
- Syafina, L. (2018). *Panduan penelitian kuantitatif akuntansi*. Medan: Febi Press.
- Tulangow, A. P., & Runtu, T. (2016). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(3).
- Wahyuni, A. S. (2019). *Pengaruh Dana Bagi Hasil (Dbh), Dana Alokasi Umum (Dau), Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Pengalokasan Anggaran Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017* [PhD Thesis]. Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
- Wance, M. (2019). Dinamika Perencanaan Anggaran Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Buru Selatan. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 5(1).
- Zahari, M. (2018). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal di Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 18(3), 635–646.
- Zamroni, Z. (2018). *PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL DAERAH (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2016)* [PhD Thesis]. Universitas Mercu Buana Yogyakarta.